

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Mengenai Pemberian Dana Insentif Guru Agama

Desi Rani¹ dan Sudarman²

^{1,2} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

Email: sudarmanalwy@gmail.com

Submitted: 29-11-2022

Revised: 06-04-2022

Accepted: 30-06-2022

Abstract

This devotion realized in Mandailing Natal District regarding the Provision of Incentive Funds for Religious Teachers through Edward III's theory, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The implementation of this devotion consists to two stages: The initial stage of the research, to find out a complete figure of the implementation for previous activities in order to put the right formulation for the next implementation plan. The study used a qualitative method involving 5 informants from teachers in Mda, Tpa, and Pontren selected by purposive sampling technique, using two types of data, primary and secondary data. The second stage of implementation/application, after the research conclusion analyzed, then the author determines the right formulation for program implementation, refers to Edward III's theory. After coordinated to policy makers, then authors and other parties agreed to implement the program using Edward III's theory. Based on the results of the implementation that has been applied regarding the Provision of Religious Teacher Incentive Funds through the approach of 4 aspects refers to Edward III's theory, then it shows that the implementation of the Mandailing Natal Regency government's policy regarding the Incentive Fund giving for Religious Teachers has not been implemented well before, then after the implemented of these 4 aspects, the situation in implementing the policy has improved and tends to improve, although there are still some things that become obstacles, such as the implementation of open dispositions that are still a bit fully reluctant implemented.

Keywords: Policy Implementation, Incentives

Abstrak

Pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal mengenai Pemberian Dana Insentif terhadap Guru Agama melalui pandangan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode pelaksanaan pengabdian ini dengan dua tahap yang meliputi: *Tahap awal* penelitian, bertujuan untuk menemukan gambaran lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan sebelumnya guna menemukan formulasi yang tepat terhadap rencana pelaksanaan selanjutnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang melibatkan 5 orang informan dari guru pengajar di MDTA, TPA, dan Pontren yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. *Tahap kedua* pelaksanaan/penerapan, setelah hasil penelitian rampung di analisis, selanjutnya penulis menetapkan formulasi yang tepat untuk implementasi program yaitu penerapan teori Edward III yang dipandang sesuai dalam mengatasi persoalan yang terjadi dilapangan selama ini. Setelah berkoordinasi dengan pihak pemangku kebijakan, penulis dan para pihak bersepakat untuk melaksanakan program dengan menggunakan teori Edward III. Berdasarkan hasil pelaksanaan yang sudah diterapkan mengenai Pemberian Dana Insentif Guru Agama melalui pendekatan 4 aspek dari teori Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengenai Pemberian Dana Insentif Guru Agama belum terlaksana dengan baik sebelumnya, namun pasca penerapan 4 aspek tersebut situasi pengimplementasian kebijakan tersebut sudah mengalami perbaikan dan cenderung membaik kendati masih ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti penerapan disposisi secara terbuka masih sedikit enggan dilaksanakan secara penuh.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Insentif

1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mencapai tujuan dari visi dan misi yang sudah ditetapkan. Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat melayani masyarakat secara prima yang merupakan tolak ukur dari keberhasilan program pembangunan daerah serta nasional (Ilmu et al., 2019).

Kabupaten Mandailing Natal merupakan Daerah Otonom baru di Provinsi Sumatera Utara sebagai hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 1998, Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat 1 Sumatera Utara memutuskan pemekaran wilayah daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal secara normal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1998, Kabupaten Mandailing Natal yang dikenal dengan sebutan MADINA.

Pembangunan Daerah dalam era desentralisasi dewasa ini pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan, demokratis dan berdaya saing maju. Oleh karena itu pembangunan masyarakat harus ditempatkan sebagai fokus utama

dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan.

Salah satu sub bagian kantor yang ikut serta dalam menyukseskan visi dan misi Bupati Mandailing Natal adalah Kantor Kesejahteraan Rakyat yaitu "*meningkatkan kualitas kehidupan beragama*". Kantor Kesejahteraan Rakyat Mandailing Natal memiliki peran penting dalam menyukseskan visi dan misi Bupati khususnya di bidang keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas umat dalam beribadah, melestarikan syiar-syiar agama islam serta meningkatkan pituah islamiyah dalam dakwah.

Melalui visi dan misi tersebut Kantor Kesejahteraan Rakyat Mandailing Natal memiliki beberapa kegiatan setiap tahunnya yaitu, melaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur'an, pemilihan Da'i cilik putra-putri, lomba azan cilik, lomba nasyid untuk kaum ibu-ibu. Serta, bantuan dana terhadap tempat ibadah serta pemberian dana insentif setiap bulan kepada guru-guru MDTA, TPA, PONTREN, guru magrib mengaji, nazir masjid dan anak yatim. Pemberian dana dan penggajian ini dilakukan rutin setiap bulan dengan tujuan agar dapat mensejahterakan guru-guru yang dengan ikhlas memberikan ilmu guna mencerdaskan anak bangsa yang religius.

Insentif adalah penghargaan yang diberikan terhadap karyawan/pekerja yang melakukan pekerjaan sesuai atau bahkan melebihi dari target yang sudah ditetapkan (Dinahaji & Permana, 2012). Pembayaran insentif guru-guru ini dilakukan oleh bagian Administrasi Kantor Kesejahteraan Rakyat. Akan tetapi, ada berbagai keluhan dari beberapa guru Mdt, Tpa, dan Pontren diantaranya yaitu; banyak data yang tidak sesuai dengan penerima insentif akibatnya banyak guru yang pencairan dana insentifnya masih tertunda.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 menetapkan pemberian insentif jasa guru agama (Mdt, Tpa, dan Pontren) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan.

Implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat aspek menurut pandangan Edwards III dalam jurnal (Widiawati et al., 2021), yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Aspek Komunikasi, sebagai seseorang implementor wajib mengenali apa yang harus dilakukan serta yang akan dijalankan. Tujuan serta target dari kebijakan wajib untuk ditransmisikan dengan sempurna terhadap kelompok yang menjadi

asaran. Sehingga tidak terjadi distorsi data dalam suatu kebijakan.

2. Aspek Sumber Daya

Suatu kebijakan bisa saja sudah dikomunikasikan dengan baik, pesan dari kebijakannya tersampaikan dengan jelas serta konsisten. Namun, kekurangan ataupun ketiadaan sumber daya dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak jelas dan bahkan tidak berjalan dengan lancar dan semestinya. Sumber daya merupakan aspek yang sangat perlu dalam implementasi kebijakan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Ada tiga tolak ukur yang dapat melihat tercukupinya aspek sumber daya yaitu, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

3. Disposisi

Sebagai seorang implementator harus mempunyai disposisi yang baik supaya mampu melaksanakan kebijakan dengan baik, sehingga proses implementasi kebijakan mencapai tujuan. Ketiadaan disposisi yang baik dapat menyebabkan proses implementasi kebijakan menjadi tidak efisien. Disposisi dapat dilihat dari sikap staf dan insentif yang diberikan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan dibutuhkan adanya suatu tatanan organisasi atau pembagian kerja yang dibangun untuk dapat

melaksanakan kebijakan dengan baik dan semestinya yang dapat dilihat dari SOP (Standar Operasional Prosedur). Untuk dapat melihat struktur birokrasi ada dua tolak ukur yang digunakan yaitu, Standar Operasional Prosedur Dan Fragmentasi.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan pengabdian mengenai "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Mengenai Pemberian Dana Insentif Terhadap Guru Agama (Mdta,Tpa, dan Pontren) melalui Teori Edward III. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan perwujudan nyata yang telah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal lakukan mengenai pemberian dan insentif guru agama (Mdta,Tpa, dan Pontren).

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam 2 tahap yang meliputi:

1. Penelitian,

Bertujuan untuk menemukan informasi lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan sebelumnya guna menemukan formulasi yang tepat terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan, kemudian dianalisis untuk mendapatkan persoalan yang

terjadi di lapangan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk menemukan data berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari responden yang akan diamati (Garis,2017) dalam jurnal (Djiko & Subardi, 2020) Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan 5 orang responden melalui (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan sampel yang logis dan dapat dianggap mewakili populasi. Sampel yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah guru (Mdta, Tpa, dan Pontren). Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan observasi yang didapatkan di lokasi penelitian yaitu bukti dari kegiatan yang dilakukan dalam pemberian dana insentif. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model *interactive* dari Miles dan Huberman yaitu dengan prosedur, data direduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Karimah, Saleh & Wanusmawatie, 2014) dalam jurnal (Djiko & Subardi, 2020). Analisis data dilakukan sejak awal dari penelitian dilakukan.

2. Pelaksanaan/Penerapan,

Setelah hasil penelitian rampung di analisis, selanjutnya penulis menetapkan formulasi yang tepat untuk implementasi program yaitu penerapan teori Edward III yang dipandang sesuai dalam mengatasi persoalan yang terjadi dilapangan selama ini. Setelah berkoordinasi dengan pihak pemangku kebijakan, penulis dan para pihak bersepakat untuk melaksanakan program dengan menggunakan teori Edward III.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan berbagai informasi dan observasi yang dilakukan maka dapat dipaparkan bahwa Kebijakan Pemerintah Mandailing Natal mengenai Pemberian Dana Insentif Guru Agama yang sudah ditetapkan selama ini adalah dengan memakai pola umum yaitu pendataan dan pendistribusian dengan kendala yang berulang pula yaitu kesalahan dan kesilapan data sehingga terkesan tidak tepat sasaran.

Sementara pasca penerapan yang mengacu pada pandangan Edwards III dlm jurnal (Widiawati et al., 2021) tentang aspek yang menjadi penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut;

1. Komunikasi

Tercapainya suatu tujuan dari implementasi dari sebuah kebijakan di pengaruhi oleh beberapa aspek, dan aspek komunikasi adalah salah satu aspek yang sangat penting (Muhawarman et al., 2017). Komunikasi antara implementator dengan guru agama sangat penting dilakukan agar tidak ada nya ketimpangan informasi antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kebijakan dari pemerintah.

Pasca perbaikan komunikasi antara implementator dengan pihak guru terlihat semakin baik salah satunya adalah terlaksananya sosialisasi kurikulum yang dilaksanakan oleh pihak Kesra ke Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Sosialisasi ini bertujuan agar guru agama mengenali dan mengetahui tujuan dari program Kesra dan dapat menerapkan kurikulum tersebut terhadap anak-anak didiknya supaya tercapainya tujuan Bupati Mandailing Natal yaitu mencerdaskan anak bangsa yang religius.



Gambar 1. Observasi Lapangan Sosialisasi Kurikulum Mda 7 April 2021

2. Sumber Daya

Aspek sumber daya merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung atau bahkan dapat menjadi penghambat jalannya implementasi suatu kebijakan. Hal ini terjadi karena dengan terpenuhinya sumber daya dalam melaksanakan kebijakan maka jalan implementasi berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika sumber daya kurang maka implementasi dari kebijakan akan menjadi lambat karena yang menangani kerja kurang dari yang ditetapkan.

Pasca penyesuaian keberadaan SDM di Kantor Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mandailing Natal tentang peraturan pemerintah mengenai Pemberian Dana Insentif Guru Agama menunjukkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan sudah memadai. Namun, yang menjadi masalah adalah tidak

semua pegawai mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.

Ketersediaan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana dan anggaran memadai merupakan kunci dari berhasilnya implementasi dari suatu kebijakan.

Berdasarkan informasi yang diterima dari guru agama yang mendatangi kantor kesra mengenai pencairan merasa bahwa pegawai yang menangani administrasi pencairan selama ini tidak semua paham terhadap pertanyaan yang mereka tanyakan. Sehingga terjadinya informasi-informasi yang kurang akurat dan membuat mereka bingung sehingga harus menunggu kejelasan dari pelaksana yang lebih paham.

Kemudian dilihat dari sumber anggaran, berdasarkan pemaparan Kepala sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan, bahwa Tahun 2021 jumlah guru (Mda, Tpa,

dan Pontren) mengalami kenaikan kuantitas yaitu mencapai 2700 guru, namun yang di tanggung anggaran hanya 2381 guru. Sehingga, 319 guru harus mengalami pemotongan karena keterbatasan anggaran. Pemotongan dilakukan berdasarkan tingkatan masa kerja.

Sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Kesra belum cukup untuk dikatakan memadai hal ini dilihat dari tidak adanya penambahan fasilitas kantor untuk

pelayanan yang lebih prima dan tidak adanya dukungan fasilitas diluar kantor seperti transportasi yang digunakan untuk survey lapangan. Dari temuan lapangan menunjukkan bahwa kendaraan yang dipakai pegawai untuk melakukan survey lapangan adalah kendaraan pribadi dari masing-masing pegawai.



Gambar 2. Observasi Lapangan (Pemberian Surat Administrasi Pencairan Dana Insentif) 15 Juli 2021

3. Disposisi

Aspek disposisi merupakan sikap dari pelaksana dalam melakukan implementasi (Taruangi, 2009). Kebijakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengenai Pemberian Dana Insentif Terhadap Guru Agama menunjukkan bahwa staf pelaksana

kesejahteraan guru agama mendukung dan melaksanakan administrasi pencairan dengan baik dan semestinya. Akan tetapi masih terdapat kelemahan yang di keluhkan oleh guru-guru yaitu kurang terbukanya pihak pelaksana dalam penyampaian dana insentif tersebut.

Dalam hal ini pasca penerapan system keterbukaan menjadi salah satu informasi penting yang harus diketahui guru-guru supaya tidak adanya ketimpangan informasi dari pihak lain.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah aspek terakhir yang dapat mempengaruhi penerapan kebijakan yang dapat dilihat dari Prosedur Pengoperasian Standar kebijakan atau yang sering disebut dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) (Yalia, 2014).

Ketersediaan SOP ini bertujuan agar keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada serta kesamaan tindakan dari pihak pelaksana sehingga tidak adanya kemungkinan perbedaan system yang dilaksanakan.

Pasca penerapan system keterbukaan mengenai prosedur yang di lakukan sudah menunjukkan pelaksanaan prosedur se-sederhana mungkin sehingga pelaksanaan prosedur tidak berbelit-belit dan kesamaan tindakan dari pihak pelaksana dalam memberikan pelayanan terhadap guru agama (Mdta, Tpa dan Pontren).

Fragmentasi dapat dilihat dari kejelasan Prosedur Operasional Standar mengenai pemberian dana Insentif yang akan memudahkan pihak pelaksana dalam implementasi kebijakan pemerintah tersebut.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat yang menangani Kesejahteraan guru-guru agama menjelaskan bahwa ada syarat bagi guru agama untuk dapat menerima dana insentif yaitu masa kerja mengajar di atas 2 tahun sehingga bagi guru yang mengajar di bawah 2 tahun belum berhak untuk dapat menerima dana insentif tersebut. setelah keterbukaan prosedur ini dijalankan maka para guru agama merasa sudah baik dan tepat bagi penerima insentif yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pasca keterbukaan prosedur ditetapkan tidak lagi menjadi tanda tanya bagi siapa yang saja yang tidak menerima dana insentif tersebut dan mereka dapat memahami situasi yang ada dan akan di akomodir kembali pada tahun anggaran yang akan datang. Inshaallah.



Gambar 3. Observasi Lapangan (memberikan penjelasan terhadap guru yang protes karena nama yang bersangkutan terpotong) 13 juli 2021

4. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai paparan yang sudah disampaikan di atas mengenai implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Mengenai Pemberian Dana Insentif Guru Agama (Mda, Tpa, dan Pontren) melalui pendekatan 4 aspek dari teori Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Mengenai Pemberian Dana Insentif Guru Agama (Mda, Tpa, dan Pontren) belum terlaksana dengan baik sebelumnya, namun pasca penerapan 4 aspek tersebut situasi pengimplementasian kebijakan tersebut sudah mengalami perbaikan dan cenderung membaik kendati masih ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti penerapan disposisi

secara terbuka masih sedikit enggan dilaksanakan secara penuh.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dinahaji, H. S., & Permana, A. (2012). Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Pustakawan Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 1(1), 133-139. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/730/706>
- Djiko, R., & Subardi, B. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 120-130. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3387>
- Ilmu, M., Publik, A., & Pascasarjana, P. (2019). *Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Insentif pada Imam Masjid dan*

Guru Mengaji di Kabupaten Enrekang. 454–462.

Keputusan Bupati Mandailing Natal
Nomor : 450/0408/K/2021
Tentang Guru Taman
Pendidikan Al-Qur'an,
Madrasyah Diniyah Takmiliyah
Dan Pomdok Pesantren
Penerima Insentif Dari
Pemerintahan Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2021

Muhawarman, A., Ayuningtyas, D.,
& Misnaniarti, M. (2017).
Formulasi Kebijakan
Komunikasi Untuk
Pelaksanaan Program
Pembangunan Kesehatan.
*Media Kesehatan Masyarakat
Indonesia*, 13(2), 97.
<https://doi.org/10.30597/mkmi.v13i2.1980>

Taruangi, H. F. (2009).
*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
TUNJANGAN KHUSUS GURU
DAERAH*. 41, 43–52.

Widiawati, Y., Rusli, D., & Andriani,
D. (2021). *Implementasi Kebijakan
Tentang Pemberian Insentif Dan
Kemudahan Penanaman Modal Di
Kota Tasikmalaya*. 3(1), 13–26.

Yalia, M. (2014). Implementasi
Kebijakan Pengembangan Dan
Pemberdayaan Lembaga Sosial
Media Tradisional Di Jawa
Barat. *Patanjala : Jurnal
Penelitian Sejarah Dan Budaya*,
6(1), 149.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191>